



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



SAMBUTAN MENTERI PANRB SEPTEMBER-OKTOBER 2018

Disusun oleh : Sekretariat Kementerian PANRB



www.menpan.go.id



[kemenpanrb](https://www.instagram.com/kemenpanrb)



[Kementerian PANRB](https://www.facebook.com/KementerianPANRB)



[@kempanrb](https://twitter.com/kempanrb)



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KATA PENGANTAR

Naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB bukan sekedar lembaran-lembaran naskah yang bersifat administratif. Naskah-naskah tersebut merupakan wujud “kebijakan yang berbicara”, yang disampaikan secara langsung oleh Menteri PANRB selaku pimpinan organisasi.

Tidak hanya sebagai media penyampaian kebijakan, materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB juga digunakan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam hal informasi capaian kinerja dan inovasi yang telah dilakukan Kementerian PANRB. Oleh karena itu, sebagai pejabat yang berwenang di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, kehadiran Menteri PANRB dan materi yang disampaikannya menjadi hal yang ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian banyak pihak.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, Sekretariat Kementerian PANRB menyusun buku yang berjudul “**SAMBUTAN MENTERI PANRB SEPTEMBER-OKTOBER 2018**”, yang merupakan kompilasi naskah sambutan, *keynote speech*, dan orasi ilmiah Menteri PANRB periode bulan September hingga Oktober 2018 ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan oleh Menteri PANRB dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, tidak hanya para peserta yang menghadiri acara pada saat Menteri PANRB menyampaikan materinya.

Kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak.

Jakarta, November 2018

Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Sambutan Menteri PANRB

SEPTEMBER 2018

1. <i>Pointers</i> pada Konferensi Pers Pasca Penyelenggaraan <i>Asian Games</i> 2018....	3
2. Sambutan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....	5
3. <i>Pointers</i> pada Konferensi Pers Pelaksanaan Pengadaan CPNS Tahun 2018 ...	9
4. <i>Pointer</i> Sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Disiplin ASN yang Tersangkut Tindak Pidana Korupsi.....	12
5. <i>Pointers</i> Arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kantor Pusat PT Taspen.....	16
6. Keynote Speech Minister of Administrative and Bureaucratic Reform at The 2018 Eastern Regional Organization for Public Administration (Eropa) Conference.....	18
7. <i>Keynote Speech</i> pada The 2018 Eastern Regional Organization for Public Administration (Eropa) Conference	21
8. Sambutan pada Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung Provinsi Bali	25
9. Sambutan pada Penyerahan Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018	28
10. Sambutan pada Kunjungan Kerja ke Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	31
11. Sambutan pada Peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.....	33
12. <i>Pointers</i> pada Konferensi Pers Pengadaan CPNS Tahun 2018.....	36



OKTOBER 2018

13. <i>Pointers</i> Sambutan pada Ramah Tamah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Barat.....	41
14. <i>Pointers</i> Sambutan pada Rapat Koordinasi Sistem CAT untuk Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2018.....	44
15. <i>Pointers</i> Sambutan pada Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PANRB dengan LPP TVRI tentang Publikasi Layanan Informasi Pendayagunaan Aparatur Negara.....	46
16. <i>Pointers</i> Sambutan pada Konferensi Pers Pengumuman Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dan Perkembangan Persiapan IPS Forum 2018	48
17. <i>Pointers</i> Sambutan pada Evaluasi Zona Integritas di Lingkungan Polri Gelombang III	50
18. <i>Keynote Speech</i> pada Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2018 di Pemerintah D.I. Yogyakarta	53
19. Sambutan pada Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXXIX.....	57
20. <i>Keynote Speech</i> pada Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018	60

SEPTEMBER
2018



POINTERS

PADA KONFERENSI PERS PASCA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES* 2018

JAKARTA, 3 SEPTEMBER 2018

1. Dasar hukum pengangkatan seseorang menjadi CPNS/PNS adalah **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS**. Pengangkatan CPNS dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan usia 18-35 tahun, mengikuti seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
2. Menteri PANRB telah mengeluarkan **Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018**. Salah satu **formasi khusus** dalam penerimaan CPNS tahun 2018 adalah **olahragawan** berprestasi internasional.
3. Kemenpora sedang **merevisi** Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi Menjadi CPNS Tahun 2018 untuk dapat mengakomodasi peraih medali *Asian Games* 2018, yang **semula** dilakukan pengangkatan bagi atlet yang memperoleh minimal medali **perak** menjadi pengangkatan bagi atlet yang memperoleh minimal medali **perunggu**, dan diperuntukkan tidak hanya pada cabang olah raga **olimpiade**, namun pada **seluruh cabang olahraga**.
4. Kemenpora masih **memetakan** atlet peraih medali *Asian Games* 2018 untuk memastikan sesuai dengan kriteria/persyaratan pengangkatan sebagai PNS sebagaimana PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa jabatan/tugas untuk atlet sesuai dengan kompetensi/kualifikasi yang dimiliki.
5. Proses **pengangkatan** akan dilaksanakan pada bulan **September/Oktober 2018** melalui **seleksi** yang didasarkan **pemeringkatan sesuai dengan jumlah formasi** yang diusulkan oleh **Kemenpora**.
6. Setelah diangkat menjadi PNS, akan **dikembalikan** penempatannya sesuai dengan domisili saat ini.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI





**SAMBUTAN PADA RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN
PENGADAAN CPNS TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
JAKARTA, 6 SEPTEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian PANRB, BKN, LAN, BPKP, BSSN, dan BPPT;
- Para Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau Pejabat yang Mewakili; serta
- Para Hadirin dan Tamu Undangan yang Berbahagia.

Bismillaahirrohamaanirrohiim

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

- Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi pada **Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**

Bapak, ibu, serta para hadirin yang saya hormati,

- Seluruh bangsa di dunia sedang berlomba untuk menjadi pemenang pada era transisi yang menyajikan perubahan *landscape* di seluruh lini kehidupan, sebagaimana dikenal dengan **era industri 4.0** yang dicirikan oleh dominasi **peranan mesin, otomatisasi dan terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik.**
 - Oleh karenanya, kebutuhan utama bagi seluruh lembaga pemerintah adalah mengadaptasikan postur pemerintahan yang siap untuk menghadapi perubahan cepat.
 - Saya melihat ada 3 (tiga) hal penting, yang perlu menjadi titik perhatian, yaitu **pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sumber daya manusia.** Dari keseluruhan ini, kunci strategis utamanya tentu terletak pada sumber daya manusia yang merupakan aset terpenting bagi seluruh organisasi modern saat ini baik itu pemerintahan maupun swasta.
 - **Dalam konteks nasional, peluang ini sangat terbuka dengan hadirnya bonus demografi Indonesia, sebagaimana proyeksi Bappenas bahwa**



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

hingga tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 311 juta s.d. 318,9 juta jiwa. Sumber daya manusia ini sangat penting sebagai landasan prioritas dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang besar dan disegani.

- ➔ **Dalam konteks organisasi, seiring dengan peluang tersebut, serta untuk menghadapi tantangan perubahan, pemerintah juga perlu mempersiapkan SDM aparatur negara yang semakin profesional**, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa *hospitality*, *entrepreneurship* dan *networking*, serta diikat oleh rasa nasionalisme dan integritas yang mantap.
- Jika dicermati, **jumlah aparatur sipil negara** saat ini adalah **4,3 juta lebih**, dengan proporsi terbesar selain guru adalah **tenaga pelaksana/administrasi, yaitu sebesar 1,6 juta (38%)**.
 - ➔ Dominasi proporsi pada tenaga administratif tersebut **perlu disikapi secara bijaksana**, karena kebutuhan kelembagaan yang modern, sebenarnya justru menitikberatkan pada prioritas perekrutan SDM yang memiliki spesialisasi/keahlian pada bidang tugasnya.
 - ➔ Oleh karenanya, pada tahap **perencanaan usulan ASN yang baru idealnya lebih difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai *core business* instansi, arah pembangunan nasional/daerah serta realisasi target sasaran program Nawacita**.
 - ➔ Selain itu, untuk **mengatasi problem *mismatch* dan indiscipliner**, serta menjawab tuntutan publik tentang penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik, telah dijabarkan berbagai **program strategis untuk menghasilkan SDM yang lebih berkualitas**, melalui tahapan perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi hingga reformasi kesejahteraan SDM.

Bapak, ibu, serta para hadirin yang saya hormati,

- Prioritas perbaikan manajemen ASN, dititikberatkan pada beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) **Perencanaan ASN** pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemda harus didasarkan pada arah pembangunan nasional dan potensi daerah dengan mempertimbangkan **analisis jabatan dan analisis beban kerja**;
 - 2) **Rekrutmen dan seleksi** CPNS di-*upgrade* melalui **Computer Assisted Test (CAT)** yang hasilnya *real-time*, serta **seleksi terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi**;
 - 3) **Pengembangan kompetensi** melalui **kebijakan diklat 20 jam pelajaran per tahun** untuk setiap ASN dan perbaikan metode pengembangan kompetensinya;
 - 4) **Penilaian kinerja dan penghargaan** sebagai dasar pemberian remunerasi dan penghargaan dilakukan secara 360 derajat;



- 5) **Promosi, rotasi, dan karir** harus didesain berbasis **merit sistem** dengan memperhatikan kebutuhan nasional **berdasarkan talent pool**.
 - 6) Perbaikan **sistem pensiun** pada tahap **puanabakti** dilakukan dengan iuran bersama ASN dan pemerintah, kelayakan rasio manfaat, didanai penuh (*fully funded*) oleh lembaga pengelola pensiun, perbaikan jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya, serta pengelolaan dana untuk kesejahteraan ASN dalam bentuk penyediaan hunian dan retail.
- Berdasarkan pengalaman, **tentu telah dilakukan berbagai penyempurnaan pada proses rekrutmen ASN sebagai kunci perbaikan kualitas** pelayanan publik, perbaikan penyelenggaraan pemerintahan serta perbaikan aparatur sipil negaranya sendiri.
 - ➔ Oleh karenanya, pada tahap perencanaan masih **tetap memprioritaskan tenaga pendidikan dan kesehatan**, serta tenaga untuk mendukung pembangunan **infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, dan ketahanan pangan** sesuai program pembangunan kabinet kerja.
 - ➔ Dalam kebijakan pengadaan PNS tahun 2018, **perencanaan dan rekrutmen** PNS juga mengutamakan dukungan bagi pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dengan **prioritas pada bidang pelayanan dasar** (meliputi: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur).
 - ➔ Maka, proporsi terbesar formasi CPNS difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, yang sifatnya masih kurang dan sangat dibutuhkan.
 - ➔ Saya berterimakasih, sebanyak 76 Kementerian/Lembaga dan 526 pemda telah membantu tahap perencanaan ini dengan baik, sehingga tergambar utuh kebutuhan PNS di Indonesia sebanyak 246.053 pada tahun 2018. Jumlah tersebut adalah yang terbesar sepanjang sejarah rekrutmen PNS.
 - Selanjutnya, **rekrutmen dan seleksi akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018**. Saya berpesan untuk tetap memegang teguh 6 (enam) prinsip rekrutmen dan seleksi CPNS, yaitu:
 - 1) **Kompetitif** → bersaing secara sehat, penentuan hasil seleksi didasarkan pada *passing grade* yang ditetapkan;
 - 2) **Adil** → proses seleksi yang tidak memihak atau tidak ada pilih kasih;
 - 3) **Objektif** → berlandaskan pada ketentuan/persyaratan dan hasil tes yang sesungguhnya;
 - 4) **Transparan** → seluruh tahapan proses dilakukan secara terbuka;
 - 5) **Bersih dari praktik KKN**; serta
 - 6) **Tidak dipungut biaya** → tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi CPNS
 - Pada akhirnya, keseluruhan upaya ini tentu membutuhkan sinergi yang kuat dari seluruh *stakeholder*, Kementerian/Lembaga terkait serta dukungan dari masyarakat, karena prinsipnya semua **bekerja bersama** untuk membangun pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- **Proses ini tidak berhenti namun berkelanjutan secara estafet**, hingga saat pendayagunaan PNS pada instansi masing-masing yang perlu dijaga adalah konsistensi, kinerja, dan kontribusinya sebagai aparatur negara untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
- **Besar harapan saya, seluruh instansi terkait dapat mendukung terwujudnya kinerja ASN yang optimal dalam mendorong kesejahteraan bangsa melalui postur birokrasi yang profesional dan berintegritas serta digerakkan oleh “motor” SDM aparatur yang semakin kompeten dan berkinerja tinggi.**
- **Saya sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini secara lancar, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan ridha-Nya bagi segenap upaya kita dalam memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara di masa-masa mendatang.**

Sekian dan terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.





POINTERS PADA KONFERENSI PERS
PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS TAHUN 2018
JAKARTA, 6 SEPTEMBER 2018

1. Jumlah dan Jenis Formasi

- Ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penetapan Kebutuhan PNS Secara Nasional Tahun 2018.
- Prinsip penentuan alokasi formasi adalah *zero/minus growth* kecuali untuk formasi jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan.
- Tambahan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil secara nasional untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebanyak 238.015, dengan rincian instansi pusat sebanyak 51.271 dan instansi daerah sebanyak 186.744.
- Jumlah tersebut dialokasikan untuk 76 K/L dan 525 pemda Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Jenis jabatan untuk instansi pusat terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (*core business*) dari instansi bersangkutan, dan mendukung Nawacita serta RPJMN. Sedangkan untuk daerah, jenis jabatan meliputi guru, dokter, perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

2. Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran

- Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Pendaftaran peserta seleksi calon pegawai negeri sipil dilakukan serentak secara daring/*online* oleh panitia seleksi nasional yang secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal pendaftaran daring/*online* (sscn.bkn.go.id).
- Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan.
- Persyaratan administratif pada saat pendaftaran diharapkan tidak memberatkan pelamar.

3. Ketentuan Mengenai Formasi Khusus

- Ketentuan mengenai formasi khusus tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
- **Formasi khusus putra/putri berpredikat *cumlaude***, bagi instansi pusat dialokasikan minimal 10% sedangkan bagi instansi daerah maksimal 5% dari total alokasi formasi. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi maupun program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan.
- **Formasi khusus disabilitas**, bagi instansi pusat dialokasikan minimal 2% dan bagi instansi daerah minimal 1% dari total alokasi formasi. Setiap instansi



mengalokasikan formasi jabatan, persyaratan, jumlah, dan unit penempatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.

- **Formasi khusus diaspora** dialokasikan untuk formasi jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa dengan pendidikan minimal Strata 2. Khusus untuk perekayasa, dapat dilamar dari lulusan Strata 1. Diaspora merupakan formasi khusus yang dibuka pertama kali tahun 2018.
- **Formasi khusus putra/putri Papua dan Papua Barat**, calon pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
- **Formasi khusus atlet berprestasi internasional** minimal medali perunggu pada *olimpic* dan atau *paralympic games* sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 6 Tahun 2018.
- Dibuka kesempatan bagi **tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II)** yang memenuhi syarat, antara lain terdaftar dalam *database* Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memenuhi persyaratan seperti ketentuan UU ASN, PP 48/2005 dan terakhir diubah menjadi PP 56/2012, UU 14/2005 bagi tenaga pendidik, dan UU 36/2009 bagi tenaga kesehatan.
- Selain persyaratan tersebut, bagi eks THK-II disyaratkan berusia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, masih aktif bekerja secara terus-menerus sampai saat ini. Bagi tenaga pendidik, minimal berijazah Strata 1, dan untuk tenaga kesehatan, minimal harus berijazah Diploma III, yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi THK-II pada 3 November 2013. Selain itu, memiliki KTP dan bukti nomor ujian THK-II pada 3 November 2013 tersebut.
- Mekanisme/sistem pendaftaran untuk eks THK-II dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN. Pendaftar dari eks THK-II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
- Jumlah formasi eks THK-II sebanyak **13.347**, terdiri dari guru sebanyak 12.883 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 464 orang.

4. Seleksi dan **Passing Grade**

- Seleksi terdiri dari, seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
- Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (*passing grade*) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018.
- *Passing grade* peserta SKD dari pelamar umum 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Inteligensi Umum (TIU), dan 75 Untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

- *Passing grade* peserta SKD dari formasi khusus *cumlaude* dan diaspora, akumulasi nilai paling sedikit 298 dengan nilai TIU minimal 85.
- *Passing grade* peserta SKD dari formasi khusus disabilitas, nilai kumulatifnya 260, dengan TIU minimal 70.
- *Passing grade* peserta SKD dari formasi khusus putra-putri Papua/Papua Barat, nilai akumulatif 260 dengan TIU minimal 60.
- Untuk eks Tenaga Honorer K-II, nilai akumulatif minimal 260 dan TIU minimal 60.
- Untuk peserta seleksi dari olahragawan berprestasi internasional, nilai terendah merupakan nilai ambang batas.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.





**POINTERS SAMBUTAN
PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PENEGAKAN DISIPLIN ASN YANG TERSANGKUT
TINDAK PIDANA KORUPSI
KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Menteri Dalam Negeri;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
- Para Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga;
- Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; serta
- Hadirin yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- **Puji syukur** kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat hadir pada kegiatan **Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penegakan Disiplin ASN yang Tersangkut Tindak Pidana Korupsi**, sebagai bentuk komitmen dan konsistensi upaya kita bersama menciptakan lingkungan birokrasi dan ASN yang kompatibel, akuntabel, dan akseptabel melalui upaya pencegahan dan pemberantasan budaya maupun praktik-praktik birokrasi yang koruptif.
- **Saya baru tiba, mendampingi kunjungan bapak Presiden RI ke Korea Selatan.** Saya melihat bahwa banyak negara maju di dunia, yang masyarakatnya sejahtera, yang sistem pemerintahannya efektif dan efisien dalam melanjutkan pembangunan, ditentukan oleh SDM aparatur yang disiplin dan bekerja keras, serta penyelenggaraan birokrasi yang bersih, cepat, modern, dan profesional.
- Saya menandatangani MOU dengan **Ministry of Personnel Management (MPM)** dan **Ministry of Interior and Safety (MOIS)**, tentu sejalan dengan kesinambungan dan keberlanjutan upaya untuk mendorong sistem manajemen pegawai negeri yang lebih baik pada semua kementerian dan lembaga.
- Ditambah lagi, sekarang sudah **memasuki tahapan awal proses rekrutmen 238.015 calon PNS** yang nantinya akan **ditugaskan secara menyebar pada instansi pusat dan daerah, maka prioritas utamanya tentu ada 2 (dua), yaitu: 1) bagaimana mencetak ASN yang bersih, dan 2) bagaimana menjaga kinerja ASN juga tetap bersih** (tidak terpengaruh nilai-nilai dan budaya yang



menyimpang), sehingga kinerja ASN tetap optimal dalam menjalankan pemerintahan, mencapai target pada program yang telah dicanangkan, dan pada akhirnya mendukung terwujudnya **landasan sistem pemerintahan yang bersih dan profesional, serta bebas dari praktik KKN.**

- Inilah tanggungjawab kita bersama-sama, walaupun porsi dan bagian tugasnya berbeda, tapi masih dalam satu gerbong dan lokomotif yang mengarah pada satu tujuan, yaitu **tujuan nasional, pembangunan yang optimal.**

Hadirin dan saudara-saudara yang saya hormati,

- Dalam periode waktu perkembangan bangsa sekarang, justru banyak pemberitaan dan realita bahwa ASN di berbagai instansi terlibat dalam tindak pidana korupsi. Melihat agenda Rakornas yang penting, **saya juga ingin memberikan gambaran dalam dimensi konstruktif.**
- Sebelum saya menjadi Menteri PANRB, saya mengawal implementasi **strategi nasional pemberantasan korupsi** yang terfokus pada dua langkah penting, yaitu **pencegahan dan pemberantasan.** Inilah koridor yang perlu menjadi atensi dan perhatian bersama, karena dua hal ini saling melengkapi dan bertautan tidak terpisahkan satu dengan lainnya.
- Dalam koridor PNS terlibat dalam tindak pidana, upaya yang dikedepankan tentu pemberantasan, namun jika diberantas terus, menjadi tidak solutif, banyak lubang yang harus segera digantikan, sedangkan beban pekerjaan harus terus berjalan. Oleh karenanya, juga dilakukan upaya yang sifatnya pencegahan, pembinaan secara internal, menutup sistem dan peluang bagi terjadinya korupsi.
- Oleh karenanya, besar harapan, bahwa **rapat koordinasi ini, bukan lagi membahas hal-hal yang sifatnya wacana, tetapi lebih dalam dan mendasar hingga ke tataran implementatif.** Saya berharap para peserta yang terlibat dalam diskusi dan koordinasi dapat **memberikan saran, masukan dan pendapat yang komprehensif,** sehingga di akhir Rakornas ini dapat diformulasikan langkah yang tepat dalam membangun disiplin ASN sehingga dapat meminimalisir bahkan menghilangkan praktik korupsi di lingkungan kerjanya.

Hadirin dan saudara-saudara yang saya hormati,

- Memasuki pokok persoalan (disiplin PNS yang terlibat tindak pidana korupsi), UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS diatur bahwa apabila **PNS sudah diputus *inkracht* oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi, maka dirinya diberhentikan tidak dengan hormat.**
- Faktanya, berdasarkan data **BKN tercatat ada 2.357 PNS yang belum diberhentikan, walaupun sudah divonis *inkracht* karena melakukan tindak korupsi.**
 - ➔ BKN sendiri telah melakukan pemblokiran data dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) terhadap PNS tersebut agar hak-hak kepegawaiannya



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

(seperti hak keuangan dan hak lainnya) diputus/dihentikan, tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian lanjutan bagi keuangan negara.

- Bagi instansi yang menaungi 2.357 PNS itu, **tetap dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan** untuk sinkronisasi data dan pendampingan teknis, **jika masih ada penyimpangan dari PPK, saya akan memberikan sanksi tegas.**
- Secara lintas kelembagaan, saya ingin membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat diantara seluruh pihak terkait, untuk **mendorong penyelesaian masalah ini dengan memperhatikan berbagai pertimbangan strategis baik yang sifatnya nasional maupun daerah.** Karena sekali lagi, kita sudah memasuki masa-masa regenerasi kepemimpinan nasional melalui tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 secara serentak, jangan sampai birokrasi pemerintahan tidak berjalan, akhirnya agenda dan program kerja di masing-masing instansi dan lembaga terhambat, dampaknya pembangunan tidak berjalan untuk kepentingan masyarakat.
- Selanjutnya, pada tataran pembinaan internal, **optimalisasi peran Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) sangatlah penting**, dan ini sudah ada inspektoratnya di kelembagaan masing-masing. Silahkan berdayakan, kuatkan pengawasan internal, berikan *reward* dan *punishment* yang mendukung bagi terciptanya situasi kerja yang kondusif, kolaboratif dan konstruktif, bukan justru sebaliknya. Pengawasan bukan sebagai **watch dog**, namun memberikan saluran dan ruang gerak yang efektif bagi sumbatan-sumbatan internal.

Hadirin dan saudara-saudara yang saya hormati,

- **Sekali lagi, dengan era keterbukaan dan kecanggihan teknologi**, seluruh isu dapat menjadi sensitif, ini yang perlu dijaga, jangan sampai efeknya seperti **snowball**, semakin menggelinding besar dan meluas, liar bahkan semakin kontraproduktif bagi kepentingan nasional.
- **Oleh karenanya, saya berharap seluruh instansi dan stakeholder terkait dapat memberikan atensi dan perhatian khusus bagi permasalahan ini, dan semoga sinergi yang dibangun** antara Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, BKN, KASN dan KPK serta dengan seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dapat terus berkelanjutan, untuk mewujudkan etalase reformasi birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.
- Sekian dan terimakasih, semoga Tuhan Yang Mahakuasa menguatkan tekad dan langkah pengabdian kita untuk memberikan yang terbaik bagi nusa, bangsa, dan negeri tercinta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI





POINTERS ARAHAN

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

DI KANTOR PUSAT PT TASPEN (PERSERO)

JAKARTA, 14 SEPTEMBER 2018

Yang saya hormati:

- Direktur Utama dan Jajaran Direksi PT Taspen;
- Komisaris Utama dan Jajaran Komisaris; serta
- Para Hadirin Sekalian.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan yang super cepat di era industri 4.0, maka kita perlu mengakselerasi **terwujudnya smart ASN** melalui pembangunan **human capital management ASN** yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi, karir, serta purnabakti.
- Pemerintah berencana **menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok** sebesar rata-rata 5% di tahun 2019.
- Prinsip-prinsip transformasi penghasilan ASN yang berbasis merit, yaitu:
 - 1) Berbasis kompetensi dan kinerja;
 - 2) Layak dan kompetitif;
 - 3) Adil sesuai bobot jabatan; serta
 - 4) Memperhatikan kemampuan keuangan negara/daerah.
- Program jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah diputuskan oleh Bapak Presiden melalui rapat terbatas untuk **diimplementasikan mulai tahun 2020**. Program ini ditujukan untuk memberikan jaminan hidup di hari tua yang memadai.
- Saat ini, manfaat pensiun yang dirasakan para pensiunan dianggap belum memadai, karena:
 - 1) Rata-rata manfaat pensiun yang diberikan hanya sekitar 10–30% dari penghasilan terakhir sebelum pensiun.
 - ➔ Semakin tinggi jabatan PNS maka semakin rendah persentase manfaat pensiun yang diberikan. Ini diakibatkan skema manfaat yang hanya didasarkan pada gaji pokok, padahal komponen penghasilan terbesar terdapat di komponen selain gaji pokok.
 - 2) Pemerintah belum memberikan kontribusi berupa iuran pemberi kerja.
 - 3) Kemampuan keuangan negara yang terbebani karena menjadi sumber pembiayaan pensiun.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- Secara prinsip, **program jaminan pensiun dan jaminan hari tua** yang akan diimplementasikan, memuat **3 hal penting**, yaitu:
 - 1) Perhitungan manfaat menggunakan **semua komponen penghasilan**, tidak hanya gaji pokok;
 - 2) Pemerintah akan memberikan kontribusi berupa iuran pemberi kerja;
 - 3) Pembentukan dana pensiun *fully funded* yang mandiri dan tidak membebani keuangan negara.
- **Pengelolaan investasi dana pensiun** yang saat ini mencapai **230 triliun**, harus bermanfaat secara langsung bagi ASN.
 - Misalnya **penyediaan hunian** (ASN city) bagi ASN, untuk mengatasi masalah **backlog perumahan**, khususnya bagi **21 persen** ASN yang belum memiliki rumah.
- Apresiasi kepada PT Taspen yang telah meraih **penghargaan keterbukaan informasi publik** selama 3 tahun berturut-turut. Saya berharap peningkatan layanan melalui efisiensi dan inovasi terus ditingkatkan.

Sekian dan Terima Kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.





KEYNOTE SPEECH

**MINISTER OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRATIC REFORM
AT THE 2018 EASTERN REGIONAL ORGANIZATION
FOR PUBLIC ADMINISTRATION (EROPA) CONFERENCE
BALI, 17 SEPTEMBER 2018**

- President of the EROPA Executive Council, **Her Excellency Ms. Yang Hyang Da;**
- Secretary General of EROPA, **His Excellency Dr. Orlando Mercado;**
- Head of National Institute of Public Administration of the Republic of Indonesia, **Dr. Adi Suryanto;**
- Governor of Bali Province, **Dr. I Wayan Koster;**
- Representatives of EROPA Member Countries;
- Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Swastiastu,***

- First of all, I would like to **welcome all of you to Indonesia**. I hope that you enjoy atmosphere and beauty of Bali.
- **Allow me to extend my sincere appreciation** to Her Excellency **Ms. Yang Hyang Ja** and His Excellency **Dr. Orlando Mercado** as President of the Executive Council of EROPA and Secretary General of EROPA, for your trust to Indonesia **to host the EROPA Conference 2018**.
- Indonesia will also be the **host of the IMF-World Bank Annual Meeting to be held on 8-14 October 2018 in Nusa Dua Bali**. It is an international confidence to investment climate in Indonesia that is well developing and stable in the midst of world economy fluctuations.

Distinguished guests, ladies and gentlemen,

- I am appointed by His Excellency President Joko Widodo as Minister of Administrative and Bureaucratic Reform nearly a month ago. One of the tasks given by the President to me is **to ensure the success of bureaucratic reform programs**. Through the program we want to create a world class bureaucracy in 2025.
- The theme of this conference **“Public Administration in Managing Global Megatrends: People, Public Services, Institutions and Ethics”** is highly relevant with what we are facing today and in the years to come and also in line with the bureaucratic reform programs.



Honourable participants of the conference,

- A few years ago, a number of think tank institutions launched research report regarding **global megatrends**. Today we witness the world is more becoming **VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous)**.
- **Rapid technology development** creates disruption, not only in private sector but also in public sector. Government institutions also have to anticipate industrial revolution 4.0 challenges inter alia:
 - ➔ **Process**, how to integrate information technology based public services, anticipate nanotechnology and artificial intelligence development.
 - ➔ **Organization**, how to formulate an agile and accountable organizational design based on whole-of-government principle.
 - ➔ **People**, how to encourage learning process in working environment and collaboration among staffs/workers.
- **Last week I joined the state visit of His Excellency President Joko Widodo to the Republic of Korea.** I learned that a country's success is highly dependent on capable, compatible, acceptable, and responsive civil servants.
 - ➔ I signed MOU with the **Ministry of Personnel Management (MPM) and Ministry of Interior and Safety (MOIS)** to create a better civil servants management.

Ladies and gentlemen,

- Allow me to **share Indonesia's government's experience** in anticipating and responding to global megatrends, namely:
 - ➔ With regard to **civil servant management**, Indonesia is in the new era of management by implementing human capital management approach.
 - ➔ In developing **civil servants competence**, we take corporate university approach emphasizing on learning process in the work place, for instance coaching and mentoring, not only in the class room. We are also developing staffs exchange models and inter government institutions internship, internship in non government institutions, and career system through talent management.
 - ➔ We applied **"one agency, one innovation" policy** to induce innovation mentality and create innovations in public services. In 2018 public service innovation of Teluk Bintuni Regency, West Papua Province namely, **"Diagnose System and Malaria Early Treatment"** have received United Nations Public Service Award.
- I would like also to share experiences related to **agencification**. Like many other countries, Indonesia also experimenting with that, by creating institutional model with flexible financial management that we call as **"Badan Layanan Umum"** and quasi-government institutional model as **"Non-Structural Institution"**. Those two institutions have proven to be more agile compared to other institutions. But at the same time it creates coordination issues.



Distinguished guests, ladies and gentlemen,

- Eastern region term as used in EROPA organization is **main actor in global megatrends**.
 - ➔ As Minister of Administrative and Bureaucratic Reform I am keen to find solutions for the government of Indonesia **to be more resilience**. Resilience as Peter Ho from Center for Strategic Future of Singapore, defined as: **“The capacity of any entity – an individual, a community, an organization, or a natural system – to prepare for disruptions, to recover from shocks and stresses, then to adapt and grow from a disruptive experience.”**
- I would like to invite all of you to contribute not only your ideas and suggestions on how public administration can be more resilience in megatrends **but also to enhance the quality of living of Asia and Pacific populations**.

Distinguished guests, ladies and gentlemen,

- By reciting “Bismillahirrahmanirrahim” **I officially open** The 2018 Eastern Regional Organization for Public Administration (Eropa) Conference.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Om.***

Minister of Administrative and Bureaucratic Reform,

Drs. Syafruddin, M.Si.



KEYNOTE SPEECH PADA
THE 2018 EASTERN REGIONAL ORGANIZATION
FOR PUBLIC ADMINISTRATION (EROPA) CONFERENCE
BALI, 17 SEPTEMBER 2018

Yang saya hormati:

- Presiden Executive Council EROPA, **Ms. Yang Hyang Ja**;
- Sekretaris Jenderal EROPA, **Dr. Orlando Mercado**;
- Kepala LAN, **Dr. Adi Suryanto**;
- Gubernur Bali, **Dr. I Wayan Koster**;
- Perwakilan Negara-Negara Anggota EROPA;
- Hadirin, Peserta EROPA Conference 2018 yang Saya Banggakan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

- Pertama-tama, saya ucapkan **selamat datang di Indonesia**. Saya berharap anda menikmati suasana Bali.
- **Apresiasi** saya sampaikan kepada **Ms. Yang Hyang Ja** dan **Dr. Orlando Mercado** sebagai Presiden Executive Council dan Sekretaris Jenderal EROPA atas kepercayaannya kepada Indonesia untuk menjadi **tuan rumah penyelenggaraan EROPA Conference 2018**.
- Indonesia juga dipercaya menjadi **tuan rumah IMF-World Bank Annual Meeting 2018** yang akan dilaksanakan **pada 8–14 Oktober 2018 di Nusa Dua Bali**. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan dunia atas iklim investasi Indonesia yang berkembang dengan baik dan stabil di tengah gejolak ekonomi dunia.

Hadirin yang saya hormati,

- Saya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sekitar satu bulan yang lalu. Salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden kepada saya adalah untuk **memastikan keberhasilan program reformasi birokrasi**. Melalui program tersebut, kami bermaksud mewujudkan **pemerintahan kelas dunia pada tahun 2025**.
- Tema yang diusung dalam konferensi ini **“Public administration in managing global megatrends: people, public services, institutions, and ethics”** relevan dengan apa yang kita hadapi pada saat ini dan tahun-tahun mendatang, serta selaras dengan program reformasi birokrasi.



Peserta EROPA Conference yang saya banggakan,

- Beberapa tahun lalu, sejumlah lembaga *think tank* meluncurkan hasil penelitiannya tentang ***global megatrends***. Saat ini kita saksikan dunia **semakin VUCA** (*Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous*).
- **Perkembangan teknologi yang sangat cepat** telah menyebabkan ***disruption***, tidak hanya di sektor privat tetapi juga di sektor pemerintahan.
- Disamping itu, instansi pemerintah juga harus mengantisipasi **tantangan revolusi industri 4.0**, antara lain:
 - ➔ **Proses**, yaitu bagaimana mengintegrasikan pelayanan publik berbasis IT dan mengantisipasi perkembangan nanoteknologi dan *artificial intelligence*;
 - ➔ **Organisasi**, yaitu bagaimana menciptakan desain organisasi yang lincah, yang berdasar pada prinsip *whole-of-government* dan akuntabel; dan
 - ➔ **People**, yaitu bagaimana mendorong pembelajaran di lingkungan kerja dan kolaborasi antar-pegawai.
- **Minggu lalu, saya mendampingi kunjungan Bapak Presiden RI ke Korea Selatan.** Saya melihat bahwa banyak negara maju dan berhasil sangat ditentukan oleh faktor **SDM aparatur** yang kapabel, kompatibel, akseptabel, akuntabel, responsif terhadap perkembangan zaman.
 - ➔ Saya menandatangani MOU dengan ***Ministry of Personnel Management (MPM)*** dan ***Ministry of Interior and Safety (MOIS)*** untuk mendorong sistem manajemen ASN yang lebih baik.

Ibu dan bapak yang saya hormati,

- Saya ingin **berbagi pengalaman pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi dan merespon *global megatrends***, antara lain:
 - ➔ Dalam hal **manajemen ASN**, Indonesia berada pada era baru manajemen kepegawaian, yaitu dengan **penerapan *human capital management approach***.
 - ➔ Dalam **pengembangan kompetensi ASN**, saat ini kami menerapkan pendekatan ***corporate university***, yang menitikberatkan **pada pembelajaran di tempat kerja**, antara lain melalui *coaching* dan *mentoring*, bukan hanya dari pembelajaran di ruang kelas. Kami juga sedang mengembangkan **model-model pertukaran pegawai dan magang antar-instansi pemerintah maupun dengan instansi non-pemerintah**, serta sistem karir melalui penerapan manajemen talenta.
 - ➔ Kami juga menerapkan **kebijakan “one agency, one innovation”**, sehingga diharapkan dapat menanamkan mentalitas inovasi dan menciptakan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pada tahun 2018 inovasi pelayanan publik dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, yakni **“Sistem diagnosis dan penanganan dini malaria”** berhasil menjadi **juara dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA)**.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- Saya juga ingin berbagi pengalaman terkait **agencification**. Seperti halnya banyak negara lainnya, Indonesia juga bereksperimen dengan agensifikasi. Misalnya dengan membentuk model kelembagaan dengan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, yaitu **Badan Layanan Umum (BLU)**, dan model kelembagaan *quasi-government* yang dinamakan **Lembaga Non-Struktural (LNS)**. Kedua jenis lembaga ini terbukti lebih lincah dibandingkan kementerian atau lembaga pada umumnya, namun juga memunculkan isu koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya.

Hadirin yang saya hormati,

- Kawasan timur, sebagaimana istilah yang digunakan EROPA, merupakan **pemeran utama dalam *global megatrends***.
 - ➔ Sebagai Menteri PANRB, saya ingin menemukan solusi agar **pemerintahan Indonesia semakin *resilience***. *Resilience*, sebagaimana dinyatakan oleh Peter Ho dari Center for Strategic Futures Singapura, adalah **kapasitas seorang individu, sebuah komunitas, organisasi, atau ekosistem dalam menghadapi *disruptions*, untuk pulih dari hantaman dan tekanan, serta beradaptasi dan tumbuh**.
- Saya ingin mengundang anda untuk berkontribusi tidak hanya agar administrasi publik dapat bertahan di tengah *megatrends*, tetapi juga **berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk di asia dan pasifik**.

Hadirin yang saya hormati,

- Demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” The 2018 Eastern Regional Organization for Public Administration (Eropa) Conference **dengan resmi saya nyatakan dibuka**.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,
Om Shanti Shanti Om.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI





**SAMBUTAN PADA
PERESMIAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
BADUNG, 17 SEPTEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Gubernur Bali;
- Bupati dan Wakil Bupati Badung;
- Para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung;
- Para Anggota Forkopimda Kabupaten Badung;
- Para Pejabat Tinggi dan Jajaran ASN Kabupaten Badung; serta
- Hadirin yang Berbahagia,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

- Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan selamat atas peresmian **Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung**.

Hadirin yang saya hormati,

- **Gagasan pembentukan mal pelayanan publik terinspirasi dari Nawacita, 6** (enam) diantaranya berkaitan erat dengan pelayanan publik sebagai **wujud kehadiran negara** di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian PANRB berperan sebagai **pembina pelayanan publik nasional dan koordinator gerakan Indonesia melayani** dalam reformasi pelayanan publik.

Hadirin yang saya hormati,

- **Pada prinsipnya**, konsep mal pelayanan publik adalah **mengintegrasikan** semua pelayanan publik baik pelayanan pusat, daerah maupun pelayanan bisnis **di satu tempat**.
- Mal pelayanan publik merupakan suatu **inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik**. **Dahulu**, banyak pelayanan yang dilakukan secara **terpisah oleh masing-masing instansi** sehingga tidak efektif, tidak efisien, dan berbiaya tinggi. Kemudian, timbul gagasan **Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)** yang



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

berfungsi sebagai *front office*, sedangkan proses teknis masih berlangsung di dinas terkait.

- Perkembangan selanjutnya adalah model **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**, dimana sejumlah pelayanan dapat diselesaikan di satu kantor termasuk pengesahan dokumen produk pelayanan karena adanya pendelegasian kewenangan kepada pimpinan kantor yang bersangkutan.
- **Dalam perkembangan terakhir** ini, kami mengedepankan **konsep mal pelayanan publik** yang merupakan pengembangan dari PTSP yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi, sehingga tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.
- Pembentukan **mal pelayanan publik juga merupakan upaya dalam memberikan kemudahan berusaha** (*Ease of Doing Business* - EODB) di Indonesia, sekaligus sebagai upaya untuk mengubah pola pikir ego sektoral menjadi kerja sama untuk memberikan layanan yang terbaik ditengah tantangan global yang semakin menuntut kecepatan dan ketepatan. Oleh karena itu, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki ciri-ciri antara lain:
 - **Jiwa *entrepreneurship***, yaitu setiap ASN dituntut untuk **mengembangkan inovasi** dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didukung dengan penerapan *e-government*.
 - ***Hospitality***, ASN dituntut memiliki sikap dan perilaku yang **melayani dengan baik**.
 - **Pemersatu NKRI**, ASN berperan menjadi **perekat NKRI**.
- Oleh karena itu, dengan hadirnya mal pelayanan publik di Kabupaten Badung, diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya perekonomian masyarakat, memperkuat daya saing global, dan tumbuhnya minat investor sehingga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
- **Hingga tahun 2018 telah terbentuk 7 (tujuh) mal pelayanan publik di Indonesia**, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Tomohon, dan Kabupaten Karangasem. **Kabupaten Badung merupakan yang ke-8**. Kami melihat bahwa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia mulai **berlomba-lomba untuk membuat mal pelayanan publik di daerahnya**. Hal ini menunjukkan niat serta usaha dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

- Sekali lagi, kami menyampaikan **apresiasi** kepada Bupati beserta jajarannya dalam pembangunan dan pengembangan mal pelayanan publik. Semoga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,
Matur Suksma. Om Shanti Shanti Om.***

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.





**SAMBUTAN PADA
PENYERAHAN PENGHARGAAN TOP 99
INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018
SURABAYA, 19 SEPTEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Gubernur Jawa Timur;
- Para Penerima Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018;
- Para Penerima Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Indonesia yang Diajukan dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2018;
- Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018;
- Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur;
- Para Anggota Forkopimda Provinsi Jawa Timur;
- Para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian PANRB dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; serta
- Hadirin yang Berbahagia,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat menghadiri acara **Penyerahan Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018**. Penghargaan ini dianugerahkan bagi 99 inovasi pelayanan publik terbaik dari seluruh Indonesia hasil kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2018.

Di samping itu, saya juga memberikan penghargaan bagi 21 inovasi yang telah berpartisipasi dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2018. Salah satunya yaitu inovasi **“Program pengendalian malaria melalui sistem *Early Diagnosis and Treatment (EDAT)*”** dari Kabupaten Teluk Bintuni menjadi **juara I dalam UNPSA 2018** wilayah Asia dan Pasifik. Penghargaan berikutnya saya akan berikan kepada tim evaluasi dan tim panel independen yang telah membantu pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2018.

Pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin meluncurkan *International Public Service Forum* yang akan diselenggarakan pada 7-8 November 2018 di Jakarta. Harapannya, kita dapat mempromosikan kemajuan pelayanan publik Indonesia kepada dunia internasional.



Hadirin yang saya hormati,

Sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan nasional, dibutuhkan landasan stabilitas ekonomi yang kuat, artinya pilar-pilar ekonomi di daerah juga harus kuat. Kuatnya pilar perekonomian daerah bertumpu pada dua hal, yaitu masuknya investasi ke Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat, yang keduanya bertopang pada penyelenggaraan kemudahan untuk berinvestasi dan berusaha (EODB).

Oleh karenanya, untuk percepatan EODB dibutuhkan pelayanan publik yang semakin mudah, biaya ringan, dan tidak berbelit. Kuncinya ada pada penyelenggaraan pelayanan di setiap instansi pemerintahan, dan pada akhirnya salah satu terobosan pentingnya adalah mal pelayanan publik.

Hadirin yang saya hormati,

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dilaksanakan setiap tahun sejak 2014. Diharapkan dengan kompetisi tersebut dapat terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman antar instansi dan daerah. Di samping itu, inovasi - inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional, agar segera di-*scaling up* menjadi program nasional. Oleh karena itu, kebijakan seperti Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) agar diteruskan dan ditingkatkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami sampaikan selamat kepada para penerima penghargaan, semoga dapat terus meningkatkan semangat dan motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Bagi yang belum menerima penghargaan, agar dapat terus belajar dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan terus berinovasi.

Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.





**SAMBUTAN PADA
KUNJUNGAN KERJA KE BADAN PENGUSAHAAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
(BP BATAM)
BATAM, 20 SEPTEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Kepala BP Batam;
- Jajaran Pimpinan dan Staf BP Batam; serta
- Para Hadirin yang Berbahagia,

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

- Pada pagi yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri acara ini.
- Saya memberikan apresiasi kepada BP Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kota Batam, atas keberhasilan pembangunan mal pelayanan publik di Kota Batam.

Hadirin yang saya hormati,

- **Perkembangan teknologi yang sangat cepat** telah menyebabkan ***disruption***, baik di sektor publik maupun sektor privat.
- Indonesia sebagai **bagian dari masyarakat internasional** juga harus **memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan** atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dengan aksi nyata.
 - ➔ Pemerintah juga dihadapkan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu dengan adanya satu pasar tunggal ASEAN dimana pergerakan barang dan jasa semakin bebas di kawasan ASEAN. Hal ini mengakibatkan semakin ketatnya persaingan antar individu antar negara yang harus diantisipasi dengan baik.
- Selain itu, pemerintah juga harus **menghadapi tantangan revolusi industri 4.0**, antara lain melalui perlunya integrasi pelayanan publik berbasis IT, menciptakan desain organisasi yang lincah dan akuntabel, serta mendorong sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan tuntutan perkembangan global.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Hadirin yang saya hormati,

- Pada pertengahan Agustus yang lalu, saya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu tugas penting yang diberikan oleh Presiden kepada saya adalah untuk **memastikan keberhasilan program reformasi birokrasi**. Melalui program tersebut, kami bermaksud mewujudkan **pemerintahan kelas dunia pada tahun 2025**.
 - Ada **8 area perubahan reformasi birokrasi**, antara lain adalah pembenahan atau **reformasi dalam pelayanan publik**. Harapannya yaitu meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga peringkat kemudahan berusaha di Indonesia menjadi lebih baik.
 - Untuk itulah **saya mendorong semua instansi pemerintah**, termasuk BP Batam agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Caranya yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, dan terjangkau yang didukung dengan sistem IT yang handal, serta selalu meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi secara konsisten.
 - **Secara khusus**, saya juga mendorong agar **data center** yang ada di BP Batam menjadi **unsur penting dalam pengambilan kebijakan** atau *decision support system* serta dapat mendukung operasionalisasi mal pelayanan publik dengan lebih baik.
- Terakhir, saya ucapkan selamat bekerja dan melayani masyarakat. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita bersama. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.





**SAMBUTAN PADA
PERESMIAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BATAM, 20 SEPTEMBER 2018**

Yang saya hormati:

- Gubernur Kepulauan Riau;
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam;
- Kepala BP Batam;
- Direktur Utama PT. Taspen (Persero);
- Para Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kota Batam;
- Para Pejabat Tinggi dan Jajaran ASN Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam;
- Para Pejabat Kementerian/Lembaga; serta
- Hadirin yang Berbahagia,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Salam Sejahtera untuk Kita Sekalian.

- Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat **Tuhan Yang Maha Kuasa**, karena atas berkat dan rahmat-Nya, pada hari ini kita dapat hadir pada **Peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Batam**.

Hadirin yang saya hormati,

- Sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan nasional, dibutuhkan **landasan stabilitas ekonomi nasional yang kuat**, artinya **pilar-pilar ekonomi di daerah juga harus kuat**.
- Kuatnya pilar perekonomian daerah bertumpu pada dua hal yaitu **masuknya investasi ke Indonesia** dan **iklim perekonomian yang sehat**, yang keduanya bertopang pada penyelenggaraan kemudahan untuk berusaha (EODB).
- Khususnya **Batam memiliki potensi dan daya tarik yang sangat signifikan bagi destinasi investasi**, karena **Batam adalah titik silang strategis jalur perdagangan dunia, diantara dua samudra dan dua benua**.
- Oleh karenanya, **untuk percepatan EODB dibutuhkan pelayanan publik yang semakin mudah, biaya ringan, tidak berbelit**. Kuncinya pada penyelenggaraan pelayanan di masing-masing instansi pemerintahan, dan pada akhirnya salah satu terobosan penting adalah pembangunan mal pelayanan publik, dengan satu pintu dan menyediakan pelayanan dari berbagai institusi pada satu atap pelayanan. **Inilah kunci dan esensi pembangunan mal pelayanan publik.**



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- Kemarin saya ke Surabaya memberikan penghargaan kepada seluruh instansi yang masuk dalam **top 99 inovasi pelayanan publik**.
 - ➔ Secara nasional, ini penting sebagai landasan pacu bagi seluruh instansi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, harapannya inovasi tersebut dapat dicontoh, diadaptasikan, dan diimplementasikan.
- Saya sudah mengikuti pendirian mal pelayanan publik sejak awal dibentuk di Surabaya, Banyuwangi, Jakarta, Denpasar, Bekasi, Tomohon, Karangasem, dan **terakhir Badung**.
 - ➔ Saat di Polri, saya mendorong keikutsertaan pelayanan yang terintegrasi, yaitu Samsat untuk satu atap dengan pelayanan lainnya.
 - ➔ Sekarang, saya mendorong semua instansi untuk turut berpartisipasi dalam mal pelayanan publik.
- Kehadiran pelayanan publik yang akseptabel adalah pilar penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batam.
 - ➔ Saya sangat mengapresiasi Pemkot Batam atas didirikannya mal pelayanan publik untuk memberikan dampak signifikan bagi terciptanya pelayanan yang semakin mudah diakses masyarakat, dan semakin menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat.
 - ➔ Disini juga hadir BP Batam yang saya yakini memiliki tujuan yang sama untuk membangun Batam yang semakin maju, juga dengan konsep yang sama yaitu optimalnya pelayanan publik.
 - ➔ Saya berharap, ini akan menjadi sinergi yang baik serta menghidupkan gelora perkembangan batam sebagai contoh/*pioneer* penyelenggaraan pelayanan publik yang menggerakkan perekonomian daerah, dan akhirnya membangun kemajuan bagi masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

- Kami sampaikan **apresiasi yang tinggi** kepada seluruh pihak, baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, serta swasta yang telah berkomitmen untuk bekerja sama dalam pembentukan dan pengembangan mal pelayanan publik. Semoga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Batam dan sekitarnya.
- Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan **selamat bergabung dalam mal pelayanan publik**. Semoga dapat memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, nyaman, berkepastian hukum, dan berkelanjutan.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.,

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.





**POINTERS PADA KONFERENSI PERS
PENGADAAN CPNS TAHUN 2018
JAKARTA, 21 SEPTEMBER 2018**

1. PENGANTAR

- Saat ini pemerintah sedang menata SDM aparatur yang **profesional dan berdaya saing** oleh karena itu pemerintah bersama dengan DPR RI telah menetapkan UU Aparatur Sipil Negara pada tahun 2014.
- Berdasarkan UU ASN, pegawai ASN terdiri atas:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil (**PNS**).
 - 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (**PPPK**).
- Jumlah PNS saat ini adalah 4,35 juta dengan komposisi:
 - Guru = 1.636.322 (37,60%)
 - Jabatan Kesehatan = 264.305 (6,07%)
 - Jabatan Teknis = 372.740 (8,57%)
 - Jabatan Struktural = 434.588 (9,99%)
 - Jabatan Pelaksana (Pengadministrasi Umum) = 1.643.535 (37,77%)
- Komposisi PNS yang masih didominasi oleh jabatan pengadministrasi umum tersebut, sulit diharapkan dapat mencapai profesionalitas dan daya saing yang tinggi.
- Oleh karena itu pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan secara nasional sejumlah 238.015 formasi CPNS yang diprioritaskan bagi jabatan yang spesifik dan berkeahlian. Alokasi formasi tersebut terdiri atas:
 - Tenaga Pendidikan = 122.454 Formasi
 - Tenaga Kesehatan = 60.315 Formasi
 - Tenaga Teknis = 55.246 Formasi
- Jenis jabatan yang diprioritaskan pada seleksi CPNS tahun 2018 ini adalah tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis keahlian yang sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Nawacita.

2. Kronologi Permasalahan Tenaga Honorer

- Dalam kurun waktu 2005-2014, pemerintah telah mengangkat Tenaga Honorer K-I dan K-II sebanyak 1.070.092 orang, dengan rincian:
 - 860.220 orang diangkat tanpa tes.
 - 209.872 orang diangkat dengan tes.
- Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 yang pada intinya menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8.
- Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2012, yang merupakan hasil kesepakatan pemerintah bersama Komisi II, VIII, dan X DPR RI, tenaga honorer K-II harus mengikuti seleksi 1 kali dan telah dilaksanakan tahun 2013. Dengan demikian secara *de jure* permasalahan tenaga honorer tersebut sudah selesai.



- Tenaga Honorer K-II yang tidak lulus tes tahun 2013 (**eks Tenaga Honorer K-II**) yang tercatat dalam *database* BKN, jumlahnya sebanyak 438.590 orang, dengan komposisi sebagai berikut:
 - Guru = 157.210 (35,84%)
 - Dosen = 86 (0,02%)
 - Tenaga Kesehatan = 6.091 (1,38%)
 - Tenaga Penyuluh = 5.803 (1,33%)
 - Tenaga Administrasi = 269.400 (61,43%)
- Namun demikian, pada kenyataannya (*de facto*) eks Tenaga Honorer K-II tersebut masih menuntut untuk dapat menjadi PNS.

3. Solusi Penanganan Eks Tenaga Honorer K-II

- Pemerintah bersama 7 Komisi DPR RI yaitu Komisi I, II, III, VIII, IX, X, dan XI pada tanggal 23 Juli 2018, telah memutuskan untuk eks Tenaga Honorer K-II guru dan tenaga kesehatan dapat mengikuti penerimaan CPNS tahun 2018 melalui formasi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya UU ASN, UU Guru dan Dosen, serta UU Tenaga Kesehatan.
- Hasil simulasi terhadap eks Tenaga Honorer K-II guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi menjadi CPNS, yaitu:
 - Guru = 12.883 Orang.
 - Tenaga Kesehatan = 464 Orang.
- Bagi eks Tenaga Honorer K-II selain guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan dan berusia di bawah 35 tahun, dapat mengikuti seleksi CPNS melalui jalur reguler (umum).
- Sedangkan bagi eks Tenaga Honorer K-II yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti seleksi CPNS, tetapi bagi yang memenuhi persyaratan untuk melamar sebagai PPPK, dapat mengikuti seleksi PPPK yang pengaturannya hari ini selesai dibahas.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



OKTOBER
2018



**POINTERS SAMBUTAN PADA RAMAH TAMAH BERSAMA
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
PROVINSI SULAWESI BARAT
MAMUJU, 4 OKTOBER 2018**

Yang saya hormati:

- Gubernur Sulawesi Barat;
- Para Bupati, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau Pejabat yang Mewakili; serta
- Para Hadirin yang Berbahagia.

Assalaamua'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua.

- Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat bersilaturahmi pada acara ramah tamah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
- Saya sampaikan turut berduka atas terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda saudara kita di Sulawesi Tengah, terutama di wilayah Palu dan Donggala. Saya mendorong agar kita semua dapat membantu dan mengerahkan sumber daya yang ada untuk saudara kita yang tertimpa bencana.
- Sejak saya ditunjuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Presiden Joko Widodo, pada 15 Agustus 2018, ada beberapa pesan Presiden kepada saya untuk melanjutkan program reformasi yang sudah berjalan. Diantaranya adalah terkait dengan pengembangan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM), pengembangan Zona Integritas, penataan kelembagaan, penataan SDM aparatur, dan peningkatan pelayanan publik.
- Terkait dengan bidang SDM aparatur, pemerintah akan mengadakan rekrutmen dan seleksi CPNS tahun 2018 yang bertujuan untuk menghasilkan SDM aparatur yang lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024.
 - Kebijakan pengadaan CPNS tahun 2018 memperhatikan prinsip *zero/minus growth* (kecuali guru, dosen, dan tenaga kesehatan) dan kesesuaian kebutuhan dengan arah pembangunan nasional/potensi daerah.
 - Proporsi terbesar formasi CPNS difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis seperti tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang mendukung program pembangunan Nawacita.
 - Pemerintah menetapkan formasi CPNS tahun 2018 untuk 76 kementerian/lembaga dan 525 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

sebanyak 238.015, yang terdiri dari 51.271 formasi pemerintah pusat dan 186.744 formasi pemerintah daerah, yang meliputi 122.454 tenaga pendidikan, 60.315 tenaga kesehatan, dan 55.246 tenaga teknis.

- Kategori formasi terdiri dari reguler (umum) dan khusus (*cum laude*, penyandang disabilitas, putra/putri Papua dan Papua Barat, diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta eks Tenaga Honorer K-II untuk guru dan tenaga kesehatan yang masih memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.
- Dasar hukum pengadaan CPNS tahun 2018 yaitu peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2018, dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebutuhan PNS Secara Nasional Tahun Anggaran 2018.
- Dalam bidang pelayanan publik, pemerintah sedang gencar untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik dan mal pelayanan publik.
 - Dua minggu lalu, saya memberikan penghargaan bagi top 99 inovasi pelayanan publik. Hal ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas berbagai inovasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
 - Dalam hal pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), saat ini sudah terbentuk 9 MPP di berbagai daerah. Konsepnya adalah menyediakan berbagai pelayanan publik dalam satu gedung, sehingga pelayanan semakin cepat, mudah, akseptabel, dan terjangkau. Hal ini juga sebagai dukungan untuk meningkatkan peringkat EODB (*Ease of Doing Business*) Indonesia.
 - Hari kemarin, saya juga menerima Duta Besar Singapura untuk Indonesia, beliau menawarkan kerja sama *rising fellowship program*. Melalui program ini, pimpinan daerah atau *local leaders* di Indonesia diberikan kesempatan lebih untuk berkunjung ke Singapura dan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan birokrasi di Singapura, terutama terkait dengan pelayanan publik. Harapannya adalah dapat mengakselerasi peningkatan pengelolaan birokrasi yang ujungnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI





**POINTERS SAMBUTAN
PADA RAPAT KOORDINASI SISTEM CAT
UNTUK SELEKSI CPNS TAHUN ANGGARAN 2018
JAKARTA, 15 OKTOBER 2018**

Yang saya hormati:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah;
- Pejabat dan Undangan di Lingkungan Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Polri, BKN, BPKP, BSSN, BPPT, dan Tim Quality Assurance (QA) Panselnas CPNS Tahun Anggaran 2018.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Guna mewujudkan aparatur negara yang berkualitas, dilaksanakan proses seleksi pengadaan CPNS tahun 2018 untuk mengisi 238.015 formasi (51.271 instansi pusat dan 186.744 instansi daerah).
- Data SSCN BKN:
 - Lebih dari 4,38 juta putra/putri Indonesia telah membuat akun pendaftaran, dan lebih dari 3,36 juta telah menyelesaikan proses pendaftaran pada instansi dituju.
 - Hari ini, tanggal 15 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB, pendaftaran ditutup *by system*.
 - Selanjutnya dilakukan seleksi administrasi → Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) → Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- Untuk instansi daerah:
 - Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) digunakan dalam tahapan SKD dan SKB.
 - Pengamanan akan melibatkan Polri.
 - Ada ratusan titik lokasi tes, tujuannya untuk mendekatkan lokasi tes dengan domisili pelamar, karena jumlah pelamar sangat besar dan tersebar dari seluruh penjuru tanah air.
 - Banyak pelamar adalah putra-putri lokal yang berpotensi dan berkeinginan kuat menjadi abdi negara. Apabila rangkaian tes-tes tersebut dilaksanakan di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya, mereka terkendala dengan masalah biaya.
 - Oleh karenanya, sistem CAT BKN maupun sistem CAT UNBK yang dimiliki Kemendikbud dimanfaatkan secara optimal, tetap berkoordinasi dengan BKN untuk penyelenggaraan SKD dan SKB.
- Dalam perkembangannya, saya mendapat informasi, banyak Bupati dan Wali Kota yang telah ditetapkan untuk menggunakan sistem UNBK mengusulkan perubahan pelaksanaan seleksi: “menjadi difasilitasi CAT BKN”.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- Saya berharap, saran, masukan dan pertimbangan yang sifatnya konstruktif pada momen rapat koordinasi ini, karena selisih waktu yang kita miliki sangat terbatas (sudah mendekati pelaksanaan SKD dan SKB).
- Perlu dipertimbangkan juga, kapasitas sistem yang ada di BKN apakah bisa menampung tes CAT secara menyeluruh, bersamaan, dan terintegrasi nasional? Apabila butuh penyesuaian sistem, apakah juga dapat sesuai dengan target waktu? Jangan sampai menimbulkan permasalahan baru.
- Di sisi lain, perlu ada solusi dan kepastian atas keinginan para pemimpin daerah, sehingga setiap pertimbangan harus dipikirkan dan didiskusikan dengan matang sebelum nantinya diputuskan.
- Ingat, keputusan ini nantinya menyangkut hajat hidup orang banyak dan harapan sebagian besar masyarakat, saya berharap keputusan *final* nantinya, dapat menjawab amanah negara dan masyarakat, serta menjadi ladang ibadah bagi kita semua, amiin.

Wabilahitaufiq Wal Hidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.





**POINTERS SAMBUTAN
PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
KEMENTERIAN PANRB DENGAN LPP TVRI TENTANG
PUBLIKASI LAYANAN INFORMASI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
JAKARTA, 16 OKTOBER 2018**

Yang saya hormati:

- Direktur Utama LPP TVRI, beserta Para Direksi dan Dewan Pengawas LPP TVRI;
- Sekretaris Kementerian PANRB, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, beserta Jajaran;
- Para Pegawai LPP TVRI yang Saya Cintai, serta
- Hadirin yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridho-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PANRB dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI tentang Publikasi Layanan Informasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hadirin yang saya hormati,

- Perkembangan teknologi informasi dan inovasi pada era VUCA saat ini, dimana dunia sangat mudah mengalami keadaan yang penuh gejolak (*volatility*), tidak pasti (*uncertainty*), rumit (*complexity*), dan serba kabur (*ambiguity*) menuntut kita untuk selalu adaptif terhadap perubahan. Selain itu, juga sangat penting untuk berkolaborasi.
- Berbagai perusahaan kelas dunia saat ini sudah beralih atau *shifting* dari kompetisi berbasis produk ke kompetisi berbasis *platform* yang mengisyaratkan penting dan strategisnya *sharing* sumber daya secara kolaboratif. Para pelaku ekonomi lebih memilih berkolaborasi agar mampu menghadirkan *platform* bisnis sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pasar.
- Era industri 4.0 harus kita sikapi dengan cermat. Entitas kuat saat ini dan ke depan tidak lagi didominasi oleh siapa yang paling besar skala usaha dan sumber dayanya, tetapi ditentukan oleh siapa yang paling cepat dalam memanfaatkan dan menciptakan peluang.
- Oleh karena itu, saat ini kita berkumpul disini guna mempertautkan segenap kemampuan untuk berkolaborasi.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- LPP TVRI mempunyai jejaring yang dapat mencapai pelosok nusantara, memiliki instrumen untuk menginformasikan berbagai kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara secara cepat dan akurat.
- Kementerian PANRB sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, memiliki kapasitas untuk mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan TVRI.
- Nota kesepahaman yang telah kita tandatangi ini adalah wujud konkret kolaborasi tersebut.

Hadirin yang saya banggakan,

- Saya berharap, melalui nota kesepahaman ini, akan terbangun kerja sama yang sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan antara Kementerian PANRB dengan TVRI dalam publikasi layanan informasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- Beberapa hal yang akan kita aktualisasikan dalam nota kesepahaman ini, antara lain:
 - Publikasi layanan informasi dalam bidang kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik di media multiplatform;
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam bidang jurnalistik, komunikasi publik dan multimedia;
 - Produksi penyiaran dan konten kreatif dalam rangka publikasi reformasi birokrasi;
 - Pengembangan dalam bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Hadirin yang saya hormati,

- Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah kita demi bangsa dan negara.
- Saya ingin menutup sambutan dengan sebuah pantun:
*Pagi ceria bercengkerama, begitu hangat terasa indahnya.
TVRI jendela Indonesia, selalu menjadi pemersatu bangsa.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.



**POINTERS SAMBUTAN
PADA KONFERENSI PERS PENGUMUMAN
TOP 40 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018
DAN PERKEMBANGAN PERSIAPAN IPS FORUM 2018
JAKARTA, 22 OKTOBER 2018**

1. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018
 - Kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan K/L, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD tahun 2018 telah melewati tahap akhir penilaian.
 - Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh tim evaluasi dan tim panel independen yang terdiri dari akademisi dan pakar yang kompeten dan memiliki reputasi baik.
 - Proses kompetisi dilakukan secara *online* melalui aplikasi berbasis web SINOVIK (sistem informasi inovasi pelayanan publik) dengan alamat <http://sinovik.menpan.go.id>.
 - ➔ Pada penutupan pengajuan proposal inovasi pelayanan publik secara *online* tanggal 31 Maret 2018, telah terekam sebanyak 2.824 inovasi pelayanan publik.
 - Pada tanggal 19 September 2018 telah dilakukan penyerahan penghargaan bagi top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2018 oleh Menteri PANRB di Surabaya. Top 99 tersebut merupakan hasil seleksi dari ribuan proposal inovasi pelayanan publik tersebut.
 - Saat ini kompetisi telah melewati tahap akhir penilaian yaitu penetapan top 40 inovasi pelayanan publik tahun 2018, sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 636 Tahun 2018 sebagaimana terlampir.
 - Top 40 inovasi pelayanan publik merupakan inovasi yang dikategorikan *outstanding* (terpuji) hasil seleksi dari top 99 yang merupakan puncak dari rangkaian kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2018.
 - Pengumuman top 40 melalui konferensi pers, selain diharapkan memberikan penghormatan dan *prestige* bagi instansi yang inovasinya terpilih sebagai top 40, juga dalam rangka menyebarkan informasi yang dapat mendorong instansi lainnya untuk berinovasi agar memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang inovasinya terpilih sebagai top 40.
 - Inovasi pelayanan publik dari K/L/D yang masuk top 40 inovasi pelayanan publik tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:
 - ➔ 5 inovasi kementerian, meliputi: 1 inovasi Kementerian Hukum dan Ham, 1 inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2 inovasi Kementerian Luar Negeri, dan 1 inovasi Kementerian Sosial.
 - ➔ 2 inovasi lembaga, meliputi: 2 inovasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - ➔ 8 inovasi provinsi, meliputi: 2 inovasi Provinsi DKI Jakarta, 2 inovasi Provinsi Jawa Timur, 1 inovasi Provinsi Jawa Tengah, 1 inovasi Provinsi Kalimantan Selatan, 1 inovasi Provinsi Sumatera Barat, dan 1 inovasi Provinsi Sulawesi Selatan.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- 15 inovasi kabupaten, meliputi: 1 inovasi Kabupaten Banyuwangi, 2 inovasi Kabupaten Klungkung, 1 inovasi Kabupaten Lumajang, 1 inovasi Kabupaten Luwu Utara, 1 inovasi Kabupaten Malang, 1 inovasi Kabupaten Merauke, 1 inovasi Kabupaten Pangkep, 1 inovasi Kabupaten Rote Dao, 1 inovasi Kabupaten Sumbawa, 1 inovasi Kabupaten Takalar, 1 inovasi Kabupaten Teluk Bintuni, 1 inovasi Kabupaten Timor Tengah Utara, 1 inovasi Kabupaten Trenggalek, dan 1 inovasi Kabupaten Tulungagung.
 - 10 inovasi kota, meliputi: 1 inovasi Kota Bandung, 1 inovasi Kota Bogor, 1 inovasi Kota Cimahi, 1 inovasi Kota Madiun, 1 inovasi Kota Padang, 1 inovasi Kota Parepare, 3 inovasi Kota Surabaya, dan 1 inovasi Kota Tegal.
2. Penganugerahan penghargaan kepada top 40 inovasi pelayanan publik tahun 2018 akan dilaksanakan pada pembukaan *International Public Service Forum* tanggal 7 November 2018, yang rencananya akan diserahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.





**POINTERS SAMBUTAN
PADA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN POLRI GELOMBANG III
YOGYAKARTA, 23 OKTOBER 2018**

Yang saya hormati:

- Asrena Polri, Kapolda DIY, serta Para Pejabat Utama Polda DIY dan Polda Jambi;
- Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB; serta
- Para Kapolres, Direktur dan Hadirin Peserta Evaluasi dan Tim Pembangunan Zona Integritas.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya kita dapat mengikuti acara evaluasi zona integritas di lingkungan Polri gelombang III, yang sebelumnya, untuk gelombang II dilaksanakan di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
- Saya baru saja mengikuti Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan Iii Tahun 2018, di Hotel Grand Inna Malioboro, saya bergegas menghadiri kegiatan evaluasi zona integritas ini, karena penting untuk terwujudnya Polri yang semakin profesional.
- Sebagai Menteri PANRB, secara khusus saya ucapkan selamat atas capaian keberhasilan Polri serta jajaran dalam mengamankan 3 (tiga) agenda besar di tahun 2018 (Pilkada serentak, *Asian Games* serta *IMF and World Bank Annual Meeting*).
 - Capaian ini semakin menguatkan kepercayaan publik secara *legal* dan *legitimate*, bahkan memantapkan Polri menjadi institusi negara peringkat ketiga paling dipercaya publik → Suatu landasan penting bagi transformasi Polri menuju *strive for excellence*.
- Garis besar haluan *grand design* reformasi internal Polri (kultural, struktural dan instrumental) telah ditetapkan, bahkan memasuki etape periode puncaknya. Namun kita bisa merasakan realitanya yang “masih jauh panggang dari api”, karena dinamika kuantum waktu, dinamika kehidupan mendorong tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan Polri yang semakin besar seiring terlampauinya waktu, intinya, polisi adalah penjaga peradaban, polisi adalah marwah keamanan negara yang melandasi seluruh aspek kehidupan.
- Seluruh aparatur negara, baik bhayangkara Polri, prajurit TNI maupun ASN pada K/L dan pemerintah pusat hingga daerah, sejatinya dan hakikatnya adalah alat negara, perpanjangan negara untuk hadir melayani di tengah masyarakat, dan menjalankan program negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- Maka, *framework* kita harus utuh, bahwa pengabdian terbaik kepada masyarakat harus dilandasi oleh perubahan paradigma birokrasi yang semakin modern dan profesional, bukan terkungkung pada sesuatu yang kaku, patologis, tradisional apalagi tidak merespon perkembangan zaman.
- Dunia sudah berubah demikian cepatnya, teknologi dan informasi merasuk di seluruh sendi dunia, tantangan global meningkat demikian drastisnya, lalu apakah seluruh organ pemerintahan ini hanya berdiam diri? tentu jawabannya tidak, reformasi birokrasi adalah suatu keharusan yang tidak bisa dielakkan, dan wajib untuk dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan untuk mereposisi kembali sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien.
 - Demikian halnya dengan Polri, yang sistemnya mendekati sistem kepolisian nasional, namun pendekatan programnya di daerah masih sangat kuat bertumpu pada pilar kearifan lokal → di tataran pimpinan Mabes Polri berusaha kuat mendorong perubahan, namun di daerah terkadang masih menemui kendala karena pelayanan itu sendiri berbasis pada masyarakat, artinya diikat oleh kultur, adat, tradisi dan geografi yang berbeda.
 - Inilah tantangan yang harus dilampaui polisi modern, bagaimana mengakselerasi kecepatan untuk beradaptasi dengan perubahan dunia, namun tetap mengakomodir pola pelayanan yang berorientasi pada karakteristik setempat.
 - Contoh: Yogyakarta mentransformasikan pemerintahannya, untuk mewujudkan kota yang modern namun tetap tersaji nuansa tradisi keraton, dan ini menjadi tulang punggung utama pembangunan daerah.
- Saya bangga, telah banyak perubahan besar dalam birokrasi Polri.
 - Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 60,60 (2014) → menjadi 73,65 (2017).
 - Nilai akuntabilitas kinerja Polri meningkat dari 65,10 (2014) → menjadi 72,11 (2017).
 - Indeks Persepsi Pelayanan Publik meningkat dari 2,85 (2015) → menjadi 3,38 (2017).
 - Indeks Persepsi Anti Korupsi meningkat dari 2,65 (2015) → 3,41 (2017).
 - Peningkatan ini menunjukkan tren yang positif, sekaligus bukti bahwa birokrasi di Polri semakin efektif, efisien, dan berintegritas, kualitas pelayanan dan integritas Polri semakin membaik dari tahun ke tahun, dan semakin diakui oleh masyarakat.
 - Semakin banyak Polres percontohan di seluruh Indonesia yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
 - Perubahan Polri menjadi contoh bagi yang diadopsi oleh K / L dan penda lainnya.
- Zona integritas merupakan bagian dari upaya pembinaan reformasi birokrasi yang lebih masif, sebanyak 116 unit jajaran Polres dan direktorat diusulkan sebagai unit kerja percontohan oleh Polri di tahun 2018, sehingga evaluasinya harus dibagi



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

menjadi beberapa regional, pertama Jatim, kedua Jakarta, ketiga Yogyakarta, dan seterusnya.

- Evaluasi bukan untuk menilai kontes inovasi, tetapi urgensinya lebih kepada mendorong perbaikan dan pengembangan tata kelola internal.
 - ➔ Maka, berbagai rekomendasi yang diberikan perlu ditindaklanjuti secara komprehensif.
- Sekali lagi, para pimpinan yang bertanggungjawab pada unit kerja Polri yang mendapat predikat WBK/WBBM sebagai cerminan dari integritas dan kualitas pelayanan Polri harus bergerak secara konsisten dan berkelanjutan, meluaskan budaya kerja yang baik agar menular ke setiap individu, unit kerja lainnya dan akhirnya menggerakkan organisasi ke arah yang diharapkan.
 - ➔ Mari berjuang untuk perbaikan Polri yang semakin berwibawa, bersih, dan melayani. Tugas berat ini tidak bisa dipikul sendiri, namun kami titipkan masa depan Polri, masa depan bangsa dan masa depan peradaban Indonesia di pundak dan tanggungjawab semua generasi penerus.
- Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.





**KEYNOTE SPEECH PADA
RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
TRIWULAN III TAHUN 2018 DI PEMERINTAH D.I. YOGYAKARTA
YOGYAKARTA, 23 OKTOBER 2018**

Yang saya hormati:

- Gubernur dan Unsur Forkopimda Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Para Wali Kota dan Bupati se-Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Sekda, Kepala OPD, Para Pejabat Pemda D.I. Yogyakarta, serta
- Hadirin yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua

Marilah memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya kita berkesempatan menguatkan silaturahmi serta melakukan Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2018.

Dari serangkaian kunjungan ke beberapa provinsi seperti Jatim, Bali, Kepri dan Sulbar, saya senang tiba di Yogyakarta, mengingatkan kenangan saat berdinasi di Jawa Tengah dulu, saya sering mendatangi Yogyakarta untuk makan gudeg sambil menikmati suasana kota, yang kini terlihat berubah modern dan menakjubkan, oleh Pemerintah DIY dibawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta atas dukungan masyarakat. Terlihat suasana kota pelajar (*jalan*an “Malioboro”) yang mirip *Istanbul – Turki* atau *Kyoto - Jepang*, menampilkan sisi modern namun tetap kental dengan budaya dan kearifan lokal.

Saya ingin mengutarakan petikan inspirasi atas perubahan yang baik ini, karena sejalan dengan transformasi birokrasi yang mendorong hadirnya negara untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Cerita dahulu, berawal dari kebiasaan orang Prancis yang membentangkan “*kain wool sebagai penutup meja tulis, sebutannya burel*”, lalu sebutan ini berubah menjadi *bureau* bagi setiap orang yang menulis diatas kumpulan meja secara bersama. Sistem kerjanya yang saling berbagi peran, diistilahkan *bureaucratie*, birokrasi, sedangkan orang - orang yang terlibat disebut para birokrat, menjalankan sistem itu. Tabiat birokrat ini sangat rumit, segala hal menjadi berbelit dan berkelok - kelok karena dari meja yang satu ke lainnya, saling membentur tembok. Akhirnya untuk menembus tembok itu, mulai disusupkan sistemnya dengan suap atau jika diinginkan birokrat dan masyarakat, disebutlah pungli.

Sekarang, seiring berubahnya zaman, tuntutan masyarakat semakin berubah, transparansi menguat, pelayanan publik pun semakin diharapkan memudahkan urusan masyarakat, praktik suap dan pungli menjadi musuh bersama, publik juga



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

mengharapkan unsur pelayanan pemerintah yang berbelit makin dipangkas. Karena yang dibutuhkan ke depan adalah kecepatan, cepat melayani, cepat beradaptasi, cepat mengadopsi hal baru, cepat mengejar ketinggalan.

Inilah kunci suksesnya negara untuk menjadi bangsa pemenang, bangsa yang berdaya saing tinggi, melakukan reformasi sistem yang sejalan kecepatan teknologi dan informasi, dan bila *landscape* kehidupan sudah berubah demikian drastisnya, birokrasi harus didorong melalui transformasi yang fundamental.

Para hadirin yang saya hormati,

Transformasi yang fundamental jelas tampak nyata dari perubahan Yogyakarta yang dulu pernah menjadi Ibukota Indonesia (sejak 5 Januari 1946), karena hubungan langsung dengan pemerintah pusat, maka hingga sekarang pemerintah setempat “mewariskan gen” berupa sistem, struktur, kultur dan sumber daya birokrasi yang identik melekat pada “jantung” tata kelola pemerintahan negara.

Syarat utama tercapainya prioritas pembangunan baik pusat maupun daerah adalah tata kelola pemerintahannya, kunci perbaikannya terletak pada reformasi birokrasi yang tidak hanya bertumpu untuk mendapatkan birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat, tetapi lebih dari itu, yaitu *“meletakkan pondasi kebangsaan untuk memenangkan persaingan global”*.

Maka, sebagaimana penyampaian dari LPDP serta owner buka lapak, terlihat bahwa kerja sama yang dibangun dengan pemerintah DIY juga untuk tujuan untuk menyiapkan generasi yang mampu memenangkan persaingan global dan mampu bersaing secara internasional.

Namun demikian, dalam konteks nasional, terdapat keterbatasan sumber daya pengelola, serta pertumbuhan indeks efektivitas pemerintah yang belum signifikan (dalam kurun waktu 8 tahun terakhir hingga 2016, pertumbuhannya masih dibawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand). Oleh karenanya, dibutuhkan solusi yang sifatnya makro nasional, yaitu: 1) Perbaikan kualitas ASN, 2) Peningkatan kecepatan pelayanan publik yang berkualitas, 3) Penguatan tata laksana kelembagaan, serta 4) Peningkatan akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi.

Penjabaran implementatif untuk poin nomor 4 (empat) diatas adalah melalui optimalisasi kerangka evaluasi instansi pemerintah, yang berorientasi pada: 1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2) Kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta 3) Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Terkait SAKIP, instansi pemerintah semakin didorong untuk dapat mempertanggungjawabkan manfaat/hasil atas setiap rupiah anggaran yang digunakan, bahkan mendorong instansi pemerintah untuk mampu memanfaatkan anggaran dan sumber daya secara bijak untuk mencapai target-target pembangunan secara memuaskan. Evaluasi bukan sebagai ajang kompetisi bagi keberhasilan mencapai indikator/kategori penilaian, tapi memberikan konsultasi atas berbagai masalah dalam instansi pemerintah, sehingga outputnya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Hasilnya, ditunjukkan melalui perkembangan akuntabilitas kinerja di Provinsi DIY. Rapor terbaik SAKIP secara nasional masih dipegang oleh pemerintah Provinsi DIY, ini



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

adalah buah kerja keras bapak Gubernur DIY beserta jajarannya, yang didukung kuat oleh masyarakat secara *legal* maupun *legitimate*, serta tentu manfaatnya dirasakan langsung masyarakat, mendukung terbangunnya kesejahteraan yang berkeadilan, sebagaimana ilustrasi yang saya gambarkan saat diawal tadi.

Para hadirin yang saya hormati,

Saya memberikan apresiasi kepada Gubernur DIY yang telah mendorong kemajuan akuntabilitas kinerja pemerintahan di salah satu daerah istimewa dan provinsi tertua di Indonesia. Saya meyakini, bukan semata karena sejarah, struktur atau kepala pemerintahan-nya, tetapi sekarang dan hingga pada masa mendatang, bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertumpu pada reformasi birokrasi-lah yang akan melahirkan sistem yang menjadi *pilot project* dan percontohan untuk diwariskan kepada generasi penerus. *Ibarat ilmu bercocok tanam, jika sawah luput untuk ditanam maka akan rugi semusim, tetapi jika sistem tidak dibangun maka negara akan kehilangan berlapis-lapis generasi yang menjaga kelangsungan peradaban di Indonesia.*

Dalam waktu dekat (awal November 2018), Kementerian PANRB akan menguatkan implementasi kerja sama dengan Korea Selatan untuk membangun *e-government*, dan tidak lama kemudian juga akan dilaksanakan *International Public Service Forum* (IPSF). Ini juga menjadi bagian besar dari membangun kerangka sistem itu, dan saya berharap ke depan, setiap kepala daerah maupun kepala OPD dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam melanjutkan tugas-tugas kebangsaan bersama.

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.





**SAMBUTAN PADA
PENUTUPAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT I ANGKATAN XXXIX
JAKARTA, 24 OKTOBER 2018**

Yang saya hormati:

- Kepala Lembaga Administrasi Negara, beserta Jajaran;
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Lintas Kementerian/Lembaga/Daerah;
- Para Widyaiswara;
- Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXXIX; serta
- Hadirin yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga kita dapat bersilaturahmi pada Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXXIX yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, ASN memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini kita berada di penghujung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga tahun 2015-2019, dimana kebijakan pembangunan dalam bidang SDM aparatur berbasis sistem merit, yakni manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. RPJMN ketiga ini merupakan jembatan menuju RPJMN keempat tahun 2020-2024, dimana pada periode tersebut kita akan mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia.

Banyak hal yang harus kita hadapi dan kita antisipasi pada periode RPJMN ketiga ini untuk menjemput RPJMN keempat, antara lain kesiapan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tingginya ekspektasi masyarakat, serta kesiapan ASN dalam menghadapi perubahan yang super cepat di era industri 4.0.

Faktanya saat ini, kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan klasik birokrasi, antara lain masih tingginya *mismatch* antara jabatan ASN yang ada dengan potensi kewilayahan yang tersedia, komposisi ASN yang masih didominasi oleh jabatan administrasi umum, profesionalitas ASN yang harus terus ditingkatkan, serta disiplin yang masih membutuhkan pembinaan intensif. Padahal pada tahun 2024 nanti kita ingin mewujudkan *platform* smart ASN, yakni sosok SDM aparatur yang berintegritas



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

dan profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa nasionalisme, ramah dan melayani (*hospitality*), mempunyai jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), serta berjejaring yang luas (*networking*).

Hadirin yang saya banggakan,

Untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan yang semakin kompleks, serta menjawab permasalahan dalam budaya birokrasi pemerintahan, perlu upaya yang keras, cerdas dan ikhlas. Salah satunya adalah mengubah pola pikir dan cara pandang kita terhadap keberadaan ASN yang sebelumnya dipahami hanya sekedar pegawai yang digerakkan oleh aturan (*rule based*), menjadi modal SDM investatif yang berorientasi kepada kinerja (*performance based*). Karena itulah, maka arah kebijakan pembangunan ASN kedepan dikembangkan berdasarkan prinsip dasar *human capital management*, mulai dari perencanaan ASN; rekrutmen dan seleksi; pengembangan kompetensi; penilaian kinerja dan remunerasi; promosi, rotasi dan karir; sampai dengan purnabakti.

Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I adalah salah satu aktualisasi konkret dari pengembangan kompetensi melalui pola pelatihan non klasikal yang menempatkan para peserta sebagai pemimpin perubahan. Dalam praktiknya setiap peserta diwajibkan membuat proyek perubahan yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tentu harapannya proyek perubahan yang dibuat peserta tersebut bukan hanya untuk memenuhi syarat administrasi pelatihan, tetapi sebuah proyek berkelanjutan yang pada akhirnya harus memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja individu peserta maupun kinerja organisasi. Bahkan alumni pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I ini, diharapkan mampu menjadi agen perubahan nasional sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang efektif dan efisien, serta yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Hadirin sekalian,

Dalam skala makro nasional, Kementerian PANRB sedang mendesain sebuah kebijakan terobosan untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi aparatur negara melalui pengembangan ASN *corporate university* (Corpu). Sebuah model pengembangan kompetensi yang diadopsi dari sektor korporasi yang terbukti dapat memberikan perubahan yang signifikan, seperti PT. Telkom, Bank Mandiri, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), dan lain sebagainya.

Hadirin sekalian,

Sekembalinya saudara ke instansi masing-masing, saya berharap agar ide-ide atau pemikiran yang didapatkan dari pelatihan kepemimpinan serta proyek perubahan yang saudara gulirkan dapat diimplementasikan dan dikembangkan untuk mendukung pergerakan reformasi di instansi saudara masing-masing.

Saya juga mengingatkan agar terus dibangun kebersamaan dan jaringan yang sudah terjalin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi di bidang manajemen pemerintahan dan pembangunan. Semangat untuk terus berinovasi juga harus terus digelorakan dan dibangun pada unit-unit kerja yang saudara pimpin.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Hadirin sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta. Selanjutnya, dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin*”, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I angkatan XXXIX, dengan ini saya nyatakan selesai dan ditutup secara resmi. Semoga Allah SWT memberkati kita dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.





**KEYNOTE SPEECH
PADA REMBUK NASIONAL
GERAKAN INDONESIA MELAYANI TAHUN 2018
MANADO, 27 OKTOBER 2018**

Yang saya hormati:

- Gubernur Sulawesi Utara;
- Para Narasumber;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- Sekretaris Daerah Provinsi di Yogyakarta;
- Rektor Universitas Sam Ratulangi;
- Vice President Human Capital Management PT Telkom; dan
- Seluruh Peserta Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat kesehatan, kesempatan, dan semangat, untuk hadir di tempat ini, di Kota Manado, ujung utara Pulau Sulawesi.

Masih dalam suasana duka atas musibah bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, melalui kesempatan ini saya atas nama seluruh jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga saudara-saudara kita di Palu, Donggala, Sigi dan sekitarnya, dapat segera bangkit dan menjemput masa depan yang lebih cerah. Semoga jajaran pemerintahan dan birokrasi di sana dapat segera berfungsi normal kembali untuk melayani dan memberi pendampingan kepada rakyat Sulawesi Tengah.

Bapak, Ibu, dan para Hadirin yang saya hormati,

Sebelumnya, saya ingin sedikit bercerita mengenai asal muasal birokrasi. Pada mulanya adalah sebetang kain *wool* yang digunakan sebagai penutup meja tulis, kita mengenalnya sebagai taplak meja. Orang Perancis menyebutnya *burel*. Lalu, setiap tempat dengan sejumlah meja dan orang-orang yang menulis di atasnya bersama-sama disebut *bureau*, dibaca *biro*. Mereka yang di belakang meja itu berbagi peran, maka lahirlah yang disebut *bureaucratie*. Kini, kita mengenalnya sebagai birokrasi. Orang-orang di belakang meja berlapis kain *wool* itulah yang disebut *birokrat*, dan nama mereka kurang bagus pada umumnya, karena perilaku mereka sendiri. Urusan gampang dan seharusnya cepat, menjadi rumit dan berkelok-kelok. Maka kita pun mengenal tabiat *birokratis*. Berpindah dari meja ke meja yang dulu beralaskan kain *wool* itu adalah terbentur dari tembok ke tembok, berbelit-belit, kaku, rumit, tidak efisien.



Bagaimana agar tidak belokan dan benturan? Ya, melalui suap, jika itu datang dari masyarakat. Apabila itu jadi kehendak sang birokrat, kita mengenalnya dengan pungli alias pungutan liar. Tanpa itu, ditambah mentalitas dilayani, bukan melayani, urusan masyarakat menjadi panjang dan bertele-tele, bahkan gagal.

Seiring perkembangan peradaban, karakter ini, secara patologis, menjangkiti seluruh sendi pengelolaan negara yang mengadopsi sistem birokrasi tradisional klasik, Indonesia mewariskannya sedari masa pendudukan oleh bangsa Eropa - dikenal *cultuurstelsel*, birokrasi diperankan sebagai mekanisme kontrol bagi kolonialisme. Seiring kemerdekaan, wajah birokrasi semakin diorbitkan pada lintasan dimana negara berjalan untuk melayani rakyat, karena hakikatnya negara hadir untuk mewujudkan kesejahteraan.

Syukur alhamdulillah, zaman kini sudah berubah. Tuntutan zaman dan keinginan masyarakat kini bertemu di ruang yang sama. Kita sepakat, suap dan pungli sudah tidak mendapatkan ruang dalam birokrasi, juga segala bentuk unsur yang memperlambat pelayanan publik.

Tolak ukur kebesaran sebuah negara, kini tidak lagi ditentukan oleh besarnya luas wilayah atau jumlah penduduknya. Sejarah dan retorikanya, memang bangsa yang besar ditentukan oleh faktor demografis dan geografis sebagai modal dasar, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan aspek itu. Kuncinya tentu, seberapa cepat negara itu melayani, aparat pemerintah melayani masyarakatnya, mengejar ketinggalan, dan mengadopsi hal-hal baru.

Di sinilah, revolusi mental menemukan muaranya. Program pertama dari 5 (lima) program gerakan nasional revolusi mental, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, menjadi alas sekaligus semangat bagi jajaran pemerintahan untuk fokus pada penciptaan budaya pada lingkungan aparatur sipil negara. Begitu juga program lainnya yakni gerakan Indonesia bersih, tertib, mandiri, dan bersatu ditujukan untuk menciptakan perubahan budaya kerja di tengah masyarakat.

Bapak, ibu, dan para hadirin yang saya hormati

Melalui forum ini saya sampaikan, bahwa intisari keberhasilan pelaksanaan revolusi mental berada di tangan saudara sekalian yang menjadi penyelenggara pemerintahan. Berada di meja-meja saudara. Jika saudara sekalian berhasil melakukan perubahan mental ASN, maka perubahan itu akan menular, *berefek snowball*, menjadi teladan dan inspirasi, memberikan dorongan perubahan mental dan budaya di masyarakat.

Arah perubahan dan harapan reformasi birokrasi yang kita inginkan adalah pemerintahan yang lebih fokus memberi pelayanan berkualitas kepada masyarakat, mengerti harapan rakyat, bebas dari unsur KKN, pungli, dan suap. Perubahan yang pada akhirnya, menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik. Perubahan yang di dalamnya ada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

Perubahan-perubahan itu harus menyeluruh dari kepala sampai telapak kaki, dari pejabat pimpinan tinggi sampai level pelaksana. Bukan berubah karena mengikuti



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

keadaan semata, tapi berubah karena kesadaran. Berubah sebagai manifestasi komitmen untuk melayani, dari seluruh jajaran pemerintah, pemerintah daerah hingga pimpinan sampai unit-unit terkecil.

Namun, sekali lagi saya tegaskan, roda negara ini jangan hanya berputar pada sumbu internal pemerintahan itu sendiri. Bukankah kedaulatan negara sesungguhnya memang ada di tangan rakyat - dari, oleh dan untuk rakyat? Bukankah rakyat pula yang mendorong perubahan besar reformasi 1998?

Karena itulah, idealnya, revolusi mental juga tumbuh di tengah masyarakat sendiri. Sebagai generasi penerus, revolusi mental adalah *booster* - vitamin tambahan yang memberikan energi yang tak ada habisnya untuk mengabdikan kepada negeri.

Saya sendiri mengalami perubahan itu ketika memimpin kontingen Indonesia di *Asian Games 2018* lalu sebagai *chef de mission*. Saya merasakan benar revolusi mental itu, ketika seluruh atlet, pelatih, suporter dan masyarakat, bersemangat dan melahirkan sejarah baru: 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu, menduduki peringkat empat. Sebuah rekor baru sepanjang keikutsertaan Indonesia di *Asian Games*. Dunia kini melihat Indonesia sebagai raksasa baru yang punya daya saing tinggi, yang dihuni para pekerja keras dan pantang menyerah.

Bapak, ibu, dan para hadirin yang saya hormati

Dalam kerangka itulah, kita hadir di sini, dalam Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani sebagai bagian dari Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Tahun 2018. Sejalan dengan kegiatan ini pula, Kementerian PANRB menggagas pelaksanaan *The International Public Service (IPS) Forum* pada tanggal 7 s.d. 8 November 2018 di *Jakarta Convention Center*, sebagai *platform* komunikasi dan interaksi bagi para pemimpin dan pengelola pelayanan publik dalam menciptakan, memperluas dan menggerakkan partisipasi publik yang luas dan bermutu, sebagai pilar utama percepatan reformasi birokrasi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pembangunan sosial yang inklusif. Ajang ini juga menjadi etalase dan inspirasi dunia, bahwa inovasi pelayanan publik di Indonesia semakin berkualitas, dan kepemimpinan birokrat di bidang pelayanan publik juga semakin handal.

Mengakhiri sambutan ini, saya berpesan, tekad kita, perubahan yang kita laksanakan, pelayanan yang kita berikan, akan bergaung luas dan menginspirasi segenap anak bangsa dan menjadi *legacy*, warisan, peninggalan yang sangat berharga untuk anak cucu di masa depan.

Sudah kehendak zaman, juga keinginan kita bersama, untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, ibarat sebuah bahtera yang dilayarkan oleh aparat-aparat dan birokrat-birokrat yang sungguh-sungguh cekatan, telaten dan melayani dengan efektif dan efisien, serta didukung secara luas oleh gelombang lautan- insan masyarakat, saya yakin dan percaya, Allah SWT akan senantiasa merahmati dan meridai segenap upaya kita, untuk Indonesia yang kita cintai.



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Sekian dan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Drs. Syafruddin, M.Si.

